UNIVERSITAS GADJAH MADA
RUANG KEBIJAKAN NEGARA DALAM HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL: PERBANDINGAN PENGATURAN NATIONAL TREATMENT DAN KLAUSUL DIVESTASI DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITs) INDONESIA-SINGAPURA (2018) DAN INDONESIA-SWISS (2022)
Ekya Febrian Shahida, Ibrahim Hanif, S.H.,LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

RUANG KEBIJAKAN NEGARA DALAM HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL: PERBANDINGAN PENGATURAN *NATIONAL TREATMENT* DAN KLAUSUL DIVESTASI DALAM *BILATERAL INVESTMENT TREATIES* (BITs) INDONESIA–SINGAPURA (2018) DAN INDONESIA–SWISS (2022)

Ekya Febrian Shahida*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan *National Treatment* terkait kebijakan divestasi dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia–Singapura Tahun 2018 dan BIT Indonesia–Swiss Tahun 2022, serta mengkaji konsekuensi hukum dan faktor-faktor hukum yang menjelaskan perbedaan pengaturan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya rezim hukum investasi internasional yang ditandai dengan proliferasi BIT, fragmentasi interpretasi tribunal investasi, serta ketegangan antara kewajiban perlindungan investor asing dan ruang kebijakan negara dalam mengatur investasi pada sektor-sektor strategis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Penelitian menggunakan pendekatan perjanjian internasional, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi perjanjian internasional berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIT Indonesia–Singapura dan BIT Indonesia–Swiss mengadopsi desain normatif yang berbeda dalam mengatur hubungan antara *National Treatment* dan kebijakan divestasi. BIT Indonesia–Singapura menggunakan model pengecualian sektoral melalui *Annex*, sehingga kebijakan divestasi tetap berada dalam ruang lingkup pengujian *National Treatment* dan bergantung pada interpretasi tribunal. Sebaliknya, BIT Indonesia–Swiss mengatur pembatasan secara inheren melalui *footnote* yang memungkinkan kebijakan divestasi tertentu dikeluarkan dari cakupan *National Treatment* sejak awal apabila syarat pemberitahuan kepada investor terpenuhi. Perbedaan tersebut menghasilkan konsekuensi hukum berupa tingkat kepastian hukum dan ruang kebijakan negara yang berbeda. Faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan tersebut meliputi perkembangan desain perjanjian investasi modern, penggunaan teknik *treaty drafting* yang berbeda, serta upaya Indonesia dalam menyeimbangkan perlindungan investor dengan kebutuhan mempertahankan ruang regulasi domestik. Dengan demikian, perbedaan pengaturan dalam kedua BIT tidak menunjukkan inkonsistensi normatif yang mendasar, melainkan mencerminkan variasi desain hukum dalam pengelolaan hubungan investasi internasional.

Kata kunci: *National Treatment*, Divestasi, *Bilateral Investment Treaty*, Ruang Kebijakan Negara, Hukum Investasi Internasional.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
RUANG KEBIJAKAN NEGARA DALAM HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL: PERBANDINGAN PENGATURAN NATIONAL TREATMENT DAN KLAUSUL DIVESTASI DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITs) INDONESIA-SINGAPURA (2018) DAN INDONESIA-SWISS (2022)
Ekya Febrian Shahida, Ibrahim Hanif, S.H.,LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRAK

STATE POLICY SPACE IN INTERNATIONAL INVESTMENT LAW: A COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL TREATMENT AND DIVESTMENT CLAUSES IN THE INDONESIA–SINGAPORE (2018) AND INDONESIA–SWITZERLAND (2022) BILATERAL INVESTMENT TREATIES

Ekya Febrian Shahida*

This research aims to analyze the differences in the regulation of National Treatment *in relation to divestment policies under the Indonesia–Singapore Bilateral Investment Treaty (BIT) of 2018 and the Indonesia–Switzerland Bilateral Investment Treaty (BIT) of 2022, as well as to examine the legal consequences and legal factors underlying such differences. The study is motivated by the development of the international investment regime, characterized by the proliferation of BITs, fragmentation in investment treaty interpretation, and the tension between investor protection obligations and the state's regulatory space in governing strategic sectors.*

This research is normative legal research with descriptive-analytical and comparative characteristics. It employs treaty, statutory, comparative, conceptual, and historical approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively through treaty interpretation methods based on Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

The research finds that the Indonesia–Singapore BIT and the Indonesia–Switzerland BIT adopt different normative designs in regulating the relationship between National Treatment and divestment policies. The Indonesia–Singapore BIT utilizes sectoral exceptions through an Annex, thereby allowing divestment measures to remain within the scope of National Treatment review and making their legality dependent upon arbitral interpretation. In contrast, the Indonesia–Switzerland BIT incorporates an inherent limitation through a footnote, enabling certain divestment measures to be excluded from the scope of National Treatment *where prior notice requirements are fulfilled. These differences result in distinct legal consequences concerning legal certainty and the extent of state regulatory space. The legal factors explaining such differences include the evolution of modern investment treaty design, different treaty drafting techniques, and Indonesia's effort to balance investor protection with the preservation of domestic regulatory authority. Accordingly, the differences between the two BITs do not constitute a fundamental normative inconsistency but rather reflect variations in legal design within the governance of international investment relations.*

*Keywords**:** National Treatment, Divestment, Bilateral Investment Treaty, State Policy Space, International Investment Law.*